



# **RENCANA AKSI NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2020-2022**

---

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

<b>Komitmen</b>	: Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
<b>Kementerian/Lembaga Penanggung</b>	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Informasi Pusat
<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>	: Pemerintah Daerah
<b>Bappenas</b>	: Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Direktorat Politik dan Komunikasi
<b>CSO Mitra</b>	: ICW - Indonesia Corruption Watch
<b>Point of Contact</b>	:
<b>Point of Contact CSO</b>	:

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung	
Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Komisi Informasi Pusat	Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa	Diterbitkannya dokumen peraturan yang merupakan revisi PERKI SLIP	1. Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik terutama K/L 2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa	Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik terutama K/L	Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik terutama K/L		
		Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa		Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi				
	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP		Peraturan yang dibuat oleh LKPP sebagai tindak lanjut revisi PERKI SLIP (apabila terdapat perubahan yang perlu ditindaklanjuti dalam peraturan LKPP dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa)				
		Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa termasuk dalam kondisi darurat.		Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Tersedianya informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat melalui portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP		
	Indonesia Corruption Watch	Mendorong diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa			Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada publik	Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada publik	Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada publik	
		Mendorong tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa		Memberikan bantuan dalam menjangkau masukan atas opini publik				
		Mendorong terbukanya informasi seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP		Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!  
**Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Kantor Staf Presiden. Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri  
**Bappenas** : Direktorat Aparatur Negara  
**CSO Mitra** : Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)  
**Point of Contact Kementerian/Lembaga** : Rosikin (e-mail: rosikin@menpan.go.id)  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022)	1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder	1. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder 2. Jumlah pengaduan melalui SP4N-LAPOR! yang telah ditindaklanjuti sebanyak 40%	1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder.	1. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder 2. Jumlah pengaduan melalui LAPOR!-SP4N yang telah ditindaklanjuti sebanyak 45%	
		Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022)	1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan LAPOR!	1. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! 2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh lembaga pemerintah (25% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 40% laporan di tahun 2021)	1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan LAPOR!	1. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! 2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh lembaga pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022)	
		Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik	Rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik	Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik	Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Tersedianya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik dalam aplikasi SP4N-LAPOR! yang diperbarui secara berkala dan dapat diakses oleh publik	
	Pattiro	Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengaduan sedikitnya 200 laporan dari 30% instansi pemerintah yang terhubung dengan SP4N-LAPOR!	1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan. 2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada	1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan. 2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada	1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan. 2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-	1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan. 2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-	
		Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik	Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Kajian terkait rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.	Kajian terkait rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah  
**Kementerian/Lembaga Penanggung** : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Sekretariat Satu Data Indonesia  
**Bappenas** : Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
**CSO Mitra** : Publish What You Pay Indonesia; Transparency International Indonesia; MediaLink  
**Point of Contact** : Heriyadi – Kasubdit Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
**Kementerian/Lembaga**  
**Point of Contact CSO** : Meliana Lumbantoruan

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah	Kementerian PPN/Bappenas	Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dalam pembentukan rencana aksi di tingkat daerah melalui pilot project di beberapa daerah Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Penetapan rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	
	Publish What You Pay	Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan penetapan rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan evaluasi dan monitoring rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

<b>Komitmen</b>	: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
<b>Kementerian/Lembaga</b>	: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>	:
<b>Bappenas</b>	: Direktorat Pembangunan Daerah
<b>CSO Mitra</b>	: Yayasan TIFA
<b>Point of Contact</b>	:
<b>Point of Contact CSO</b>	:

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Menguatnya Kapasitas masyarakat dan pendamping Desa untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.			Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.		
		Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di <b>dua desa</b> .	1. Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 2. Rekomendasi penetapan lokasi desa untuk pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat		Fasilitasi pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Diseminasi hasil pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	
	Kementerian Dalam Negeri	Menguatnya Kapasitas pemerintah desa dan BPD untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.			Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD		
		Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di <b>di dua desa pilot project</b> .		Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat			
	Yayasan TIFA	Menguatnya Kapasitas Pemerintah Desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.			1. Sosialisasi dan bimbingan teknis Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, masyarakat, BPD, dan pendamping desa. 2. Sosialisasi dan pelatihan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, masyarakat, BPD, dan pendamping desa.	Terlaksananya bimbingan teknis Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Tersedianya modul pengenalan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat untuk aparatur pemerintah, masyarakat, BPD, dan aparatur desa.
		Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di <b>dua desa pilot project</b> .	Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa	1. Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa 2. Terpilihnya desa yang merupakan hasil koordinasi dari K/L dan Yayasan TIFA	1. Pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Review	Diseminasi hasil pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal  
**Kementerian/Lembaga** : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Lembaga Administrasi Negara  
**Bappenas** : Direktorat Aparatur Negara  
**CSO Mitra** : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nadhlatul Ulama  
**Point of Contact** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Terlaksananya diseminasi "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal"	Lembaga Admininstrasi Negara	Jumlah daerah yang mendapatkan diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada kalangan OPD	Diseminasi pada tahap diagnose/design kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah)	Penyusunan Laporan hasil Diseminasi	Diseminasi pada tahap diagnose/design kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah)	Penyusunan Laporan hasil Diseminasi	Daftar OPD di tiap daerah yang mengikuti diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal"
	Lakpesdam PBNU	Jumlah daerah yang melakukan pendampingan layanan publik kepada kelompok marginal	Ekpos hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marjinal untuk LAN.	Pemetaan dan perumusan materi strategi pendampingan.	Pemantauan pendampingan	Penyusunan laporan pendampingan	Daftar daerah yang didampingi terkait layanan publik



## RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022

**Komitmen** : Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

**Kementerian/Lembaga** : Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Hukum dan HAM

**Kementerian/Lembaga Terkait** : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

**Bappenas** : Direktorat Hukum dan Regulasi; Direktorat Pertahanan dan Keamanan

**CSO Mitra** : Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH

**Point of Contact** :

**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)
Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	Mahkamah Agung	Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung	1. SK Ditjen Badan Peradilan Umum terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas 2. SK Ditjen Badan Peradilan agama terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	Draft SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	1. SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas 2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SE Sekretaris Mahkamah Agung terkait pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
	Kejaksaan RI	Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan	Penyusunan draft pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	Kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan	Penyusunan draft Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	Tersedianya peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
	Kepolisian RI	Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kepolisian.	1. Penyusunan SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 2. Penyusunan buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	1. Tersedianya SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 2. Tersedianya buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Penyusunan Peraturan Kabareskrim Polri terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.	Tersedianya Peraturan Kabareskrim Polri terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemendiknas	Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan.	Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	Tersedianya peraturan teknis terkait dengan SOP dalam rangka pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan.	Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
	Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (koordinator YLBHI)	Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan pemenuhan asesmen kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan.	1. Keterlibatan dalam proses pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga 2. Tersedianya masukan terhadap pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga	Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga	Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga	Kajian dan asistensi terkait asesmen kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Penguatan portal informasi terkait bantuan hukum  
**Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM; Mahkamah Agung  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Kementerian PPN/Bappenas  
**Bappenas** : Direktorat Hukum dan Regulasi  
**CSO Mitra** : Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH  
**Point of Contact Kementerian/Lembaga** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Penguatan portal informasi terkait bantuan hukum	Mahkamah Agung	Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.	Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	1.Adanya uji coba dan evaluasi portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi 2.Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	
	Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.	Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	1.Adanya uji coba dan evaluasi portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi 2.Tersedianya portal informasi	
	Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (koordinator YLBHI)	Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.	1. Pemetaan kebutuhan data-data yang akan dibuka baik dalam portal informasi BPHN maupun lintas kementerian. 2. Tersedianya kajian dan masukan terkait data kebutuhan dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.	Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.		Laporan evaluasi atas portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi	



**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum  
**Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Mahkamah Agung, Kementerian PPN/Bappenas  
**Bappenas** : Direktorat Hukum dan Regulasi  
**CSO Mitra** : Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta,  
**Point of Contact Kementerian/Lembaga** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran	Penanggung Jawab	Ukuran	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH).	Penjaringan OBH baru yang akan diverifikasi dan diakreditasi (dalam bentuk sosialisasi dan pendataan)	1. Terlaksananya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. 2. Terlaksananya proses reakreditasi OBH yang sudah ada.	Terselenggaranya evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.	Adanya rekomendasi sebagai tindak lanjut evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.	
		Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.	1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal. 2. Tersedianya pedoman kurikulum pelatihan paralegal	Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal yang melibatkan OMS	Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS	Evaluasi implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS	
		Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum	1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Tersedianya Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum	1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum	Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	Evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	
	Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (koordinator YLBHI)	Peningkatan dan persebaran jumlah pemberi bantuan hukum.	Sosialisasi kegiatan <i>outreach</i> /penjaringan OBH di daerah	1. Keterlibatan dalam proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. 2. Keterlibatan dalam proses reakreditasi OBH yang sudah ada.	Keterlibatan dalam proses evaluasi proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum	Keterlibatan dalam menyusun rekomendasi tindak lanjut evaluasi.	
		Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.	Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait paralegal	Sosialisasi Peraturan Menteri Kemenkumham terkait Paralegal	Terlaksananya pelatihan paralegal	Evaluasi hasil pelatihan paralegal	
		Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum	Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait Standar Layanan Bantuan Hukum	Sosialisasi Standar Layanan Bantuan Hukum	Adopsi Standar Layanan Bantuan Hukum	Evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban  
**Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM;  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Kementerian PPN/Bappenas;  
**Bappenas** : Direktorat Hukum dan Regulasi  
**CSO Mitra** : Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH  
**Point of Contact** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan berdasarkan hasil : 1. Analisa dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN; 2. Urgensi Perubahan Penyusunan kurikulum	Evaluasi kebijakan bantuan hukum terkait pemberian bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	
		Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.	Sosialisasi kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.	Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi penyelenggara bantuan hukum di daerah	Pelatihan Tahap II peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi pemberi bantuan hukum	
	Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (Koordinator YLBHI)	Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Terlibat dalam penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Terlibat dalam penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban
		Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Terlibatnya OMS dalam penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender	Penyusunan modul peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi pemberi bantuan hukum	1. Pelatihan tahap II peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi pemberi bantuan hukum 2. Evaluasi pelatihan	

## RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022

**Komitmen** : Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi  
**Kementerian/Lembaga** : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Komisi Informasi Pusat  
**Bappenas** : Direktorat Hukum dan Regulasi; Direktorat Politik dan Komunikasi  
**CSO Mitra** : Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH  
**Point of Contact** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi	Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terinventarisir dan teridentifikasinya materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Tersedianya draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa	Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	
	Komisi Informasi Pusat	Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).				
		Keterlibatan dalam kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terlibat dalam proses penyusunan draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terlaksananya hasil rekomendasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	
	Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan (Koordinator YLBHI)	Terlaksananya fasilitasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terlibat dalam proses penyusunan draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Terlaksananya hasil rekomendasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	
		Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN	Pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Perancangan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN	Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH	Evaluasi pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan  
**Kementerian/Lembaga Penanggung** : Kementerian Sosial  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
**Bappenas** : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial  
**CSO Mitra** : Perkumpulan Media Lintas Komunitas  
**Point of Contact** : Aty Resnawati – Kabbag Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Sosial  
**Kementerian/Lembaga**  
**Point of Contact CSO** : Darwanto

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-Program Kesejahteraan	Kementerian Sosial	Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS - NG	Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial	Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial	Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial	Terlaksananya integrasi semua data terpadu kesejahteraan sosial dalam SIKS NG	
		Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap <i>feedback</i> masyarakat.	Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Tersedianya seluruh data terkait penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap <i>feedback</i>	
	Perkumpulan Media Lintas Komunitas	Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS - NG	Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS - NG	Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS - NG	Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS - NG	Diseminasi terkait adanya integrasi semua data terpadu kesejahteraan sosial dalam SIKS NG	
		Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap <i>feedback</i> masyarakat.	Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan	Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan	Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan	Diseminasi terkait adanya platform data penerima program kesejahteraan	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

<b>Komitmen</b>	: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
<b>Kementerian/Lembaga</b>	: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa PDTT
<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>	:
<b>Bappenas</b>	: Direktorat Pembangunan Daerah
<b>CSO Mitra</b>	: Wahana Visi Indonesia (WVI); Seknas FITRA; Transparansi Internasional Indonesia (TII); Kapal Perempuan; INFID; Media
<b>Point of Contact</b>	:
<b>Point of Contact CSO</b>	:

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Implementasi Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa	Kementerian Desa PDTT	Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan	Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para pemangku kepentingan.	1. Tersusunnya rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa. 2. Terlaksananya pembelajaran bagi masyarakat desa	Terimplementasi kannya model akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di lokasi pecontohan.	1. Tereplikasinya model desa percontohan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa ke 200 desa non-lokasi percontohan. 2. Evaluasi output terkait implementasi Akuntabilitas Sosial di Desa.	
	Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.	Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil terkait implementasi akuntabilitas sosial.	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.	Tersedianya hasil evaluasi berupa keberhasilan capaian bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.	
	Organisasi Masyarakat Sipil	Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa	1. Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga dan OMS terkait implementasi akuntabilitas sosial.	1. Tersusunnya panduan operasional terkait Akuntabilitas Sosial bagi masyarakat desa dan pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan di desa. 2. Asistensi pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) dan pemerintahan desa perihal akuntabilitas sosial dalam	Asistensi implementasi model akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di lokasi pecontohan.	1. Asistensi terkait replikasi model desa percontohan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa ke 200 desa non-lokasi percontohan. 2. Tersedianya hasil evaluasi berupa keberhasilan capaian cakupan pelayanan yang dilakukan oleh para kader.	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu  
**Kementerian/Lembaga Penanggung** : Komisi Pemilihan Umum RI  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  
**Bappenas** : Direktorat Politik dan Komunikasi  
**CSO Mitra** : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  
**Point of Contact Kementerian/Lembaga** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu	Komisi Pemilihan Umum RI	Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem	Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Integrasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu dan tersedianya data pemilu dalam format data terbuka (open data)	Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data)	
		Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel	Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah.	1. Penyusunan laporan evaluasi uji coba berulang rekapitulasi elektronik. 2. Diseminasi hasil uji coba berulang rekapitulasi elektronik.	
	Perludem	Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi informasi penyelenggaraan	Tersedianya kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia	Tersedianya kajian tentang ketersediaan data pemilu dan rekomendasi strategi digitalisasi menjadi format data terbuka		Tersedianya kajian rekomendasi terhadap portal pusat publikasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu.	
		Terselenggarakannya kajian akademik terkait uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel	Tersedianya rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu	Tersedianya kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik	Terselenggarakannya pemantauan uji coba rekapitulasi elektronik di beberapa daerah	1. Tersedianya kajian rekomendasi terhadap pengelolaan data hasil pemilu yang diujicoba oleh KPU 2. Diseminasi hasil kajian evaluasi uji coba e-rekap	



**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data  
**Kementerian/Lembaga** : Kementerian Kesehatan  
**Kementerian/Lembaga Terkait** :  
**Bappenas** : Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Direktorat Pembangunan Daerah  
**CSO Mitra** : International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)  
**Point of Contact** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data	Kementerian Kesehatan	Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.	1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	Terintegrasinya data terkait pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam aplikasi yang dapat diakses oleh publik.	Tersedianya dan terintegrasinya basis data terkait pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.	
	INFID	Sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.	Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19  
**Kementerian/Lembaga Penanggung** : Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan  
**Kementerian/Lembaga Terkait** :  
**Bappenas** : Direktorat Pembangunan Daerah; Direktorat Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter  
**CSO Mitra** : Seknas Fitra, PATTIRO, IBC  
**Point of Contact Kementerian/Lembaga** : Adwiani Susanti (Kasubbag Data Monev Perencanaan Ditjen Bina Keuangan Daerah)  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Keterbukaan Informasi Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19	Kementerian Dalam Negeri	Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan	Terlaksananya pengembangan portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19.	Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 (manual).	Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan.	Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2021 melalui portal yang telah dikembangkan.	
	Kementerian Keuangan	Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.	Terlaksananya pengembangan portal informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19.	Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan.		Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021 melalui portal yang telah dikembangkan.	
	CSO	Terlaksananya kolaborasi pengembangan portal informasi realisasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif dan telah diaudit	Terlaksananya kajian untuk memberi masukan terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19.	Terlaksananya FGD terkait pengembangan sistem informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020	Sosialisasi sistem informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 agar dapat digunakan oleh masyarakat luas.	Tersedianya evaluasi keterbukaan informasi anggaran penanganan pandemi COVID-19	

**RANCANGAN TARGET KOMITMEN**  
**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : XVI. Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat

**Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** : Kementerian Hukum dan HAM

**Kementerian/Lembaga Terkait** :

**Bappenas** : Direktorat Hukum dan Regulasi

**CSO Mitra** : ASUSIASI LBN AFIR INDONESIA, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBN Aceh, LBN AFIR Jakarta, LBN Bandung, LRH Jakarta, LRH Papua, LRH Masyarakat, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan LRH

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat.	Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal HAM, BPHN, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR	Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.	Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.	-	-	-

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Keterbukaan Data *Beneficial Ownership*  
**Kementerian/Lembaga** : Stranas Pencegahan Korupsi  
**Kementerian/Lembaga Terkait** : Kementerian Keuangan; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
**Bappenas** : Direktorat Aparatur Negara  
**CSO Mitra** : Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif (Publish What You Pay Indonesia)  
**Point of Contact** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Keterbukaan Data Beneficial Ownership	Kementerian Keuangan; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait	1. Adanya sosialisasi, termasuk publikasi, atas kewajiban penyampaian	1. Adanya kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan	1. Adanya struktur data BO, termasuk mekanisme integrasi yang akan digunakan	1. 100% (Seluruh korporasi mendeklarasikan BO)	1. Laporan pelaksanaan dan dokumentasi sosialisasi
		Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat	1. Adanya pemetaan dan penetapan layering	1. Adanya fitur kanal akses publik pada	1. Adanya analisa dan rekapitulasi akses publik	1. Tersedianya layer akses publik di sistem basis	1. Kebijakan penetapan layering informasi
		Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.	1. Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang akan	1. Adanya fitur kanal akses pada sistem basis data BO yang dapat oleh	1. Adanya analisa dan rekapitulasi akses APH	1. Tersedianya layer akses Aparat Penegak Hukum (APH) di sistem basis data	1. Kebijakan penetapan layering informasi data BO
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia	Publish What You Pay (PWYP) Indonesia	Adanya keterlibatan dan peran aktif Masyarakat Sipil dalam setiap tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, baik dalam pencapaian: 1. Tersedianya basis data BO 2. Terbukanya akses data BO kepada Publik 3. Termanfaatkannya data BO oleh Masyarakat Sipil, APH maupun K/L	1. Adanya kajian keterbukaan data BO 2. Adanya panduan memahami BO dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA	1. Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk CSO dan/atau komunitas dalam memahami BO dan Memetakan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA	1. Adanya akses informasi dan pemanfaatan data BO oleh CSO	1. Adanya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi BO 2. Adanya lesson learnt pelaksanaan Aksi BO	1. Dokumen kajian keterbukaan data BO 2. Dokumen Panduan Memahami BO 3. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan 4. Laporan akses informasi dan pemanfaatan data BO 5. Dokumen Monev CSO 6. Dokumen Lesson Learnt

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2020 - 2022**

**Komitmen** : Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan  
**Kementerian/Lembaga Penanggung** : Kementerian PPN/Bappenas  
**Kementerian/Lembaga Terkait** :  
**Bappenas** :  
**CSO Mitra** : Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesian Judicial Research Society (IJRS), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH  
**Point of Contact Kementerian/Lembaga** :  
**Point of Contact CSO** :

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2021)	B12 (2021)	B18 (2022)	B24 (2022)	Data Pendukung
Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan	Kementerian PPN/Bappenas	Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.	Penelitian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif	Tersedianya roadmap terkait Keadilan Restoratif	Diseminasi hasil kajian terkait ruang kewargaan oleh Sekretariat Open Government Indonesia		
	Organisasi Masyarakat Sipil Sektor Keadilan	Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.	Tersedianya kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Tersedianya kajian dan rekomendasi mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan		